



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 545 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI**

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Provinsi.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN XXV
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 545 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2023

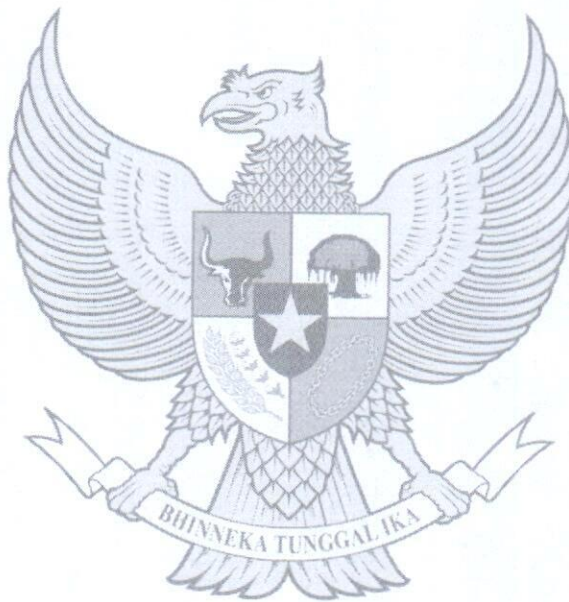
RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	21	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	150	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	45	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	31	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	36	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
6.	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
7.	AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
8.	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	10	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
9.	AHLI PERTAMA - GURU ANIMASI	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
10.	AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI	7	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
11.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	59	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
12.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	25	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
13.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JEPANG	12	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
14.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA MANDARIN	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
15.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	250	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
16.	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	41	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
17.	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	4	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
18.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
19.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	12	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
20.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	12	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
21.	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	35	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
22.	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	40	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
23.	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	35	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
24.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
25.	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	12	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
26.	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	34	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
27.	AHLI PERTAMA - GURU KULINER	47	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
28.	AHLI PERTAMA - GURU LAYANAN KESEHATAN	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
29.	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	12	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
30.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	23	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
31.	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	5	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
32.	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	99	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
33.	AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
34.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	55	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
35.	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	148	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
36.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	33	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
37.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
38.	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	99	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
39.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	269	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
40.	AHLI PERTAMA - GURU SENI PERTUNJUKAN	18	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
41.	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	55	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
42.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
43.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK FURNITUR	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
44.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	7	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
45.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
46.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
47.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	7	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
48.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	19	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
49.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
50.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PERAWATAN GEDUNG	3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
51.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNOLOGI FARMASI	4	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
52.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	115	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
53.	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA	3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
TOTAL		1922	



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN XXV
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 545 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS AKUPUNTUR MEDIS	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	3	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
3.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
4.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
5.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
6.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
7.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
8.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
9.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
10.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
11.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
12.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	1	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
13.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
14.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
15.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	2	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
16.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
17.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
18.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
19.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
20.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
21.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
22.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
23.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
24.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	2	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
25.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	2	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
26.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK	1	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
27.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
28.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
29.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	4	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
30.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
31.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
32.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-HEMATOLOGI ONKOLOGI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
33.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-PEDIATRI GAWAT DARURAT	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
34.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI KARDIOVASKULER DAN CRITICAL CARE	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
35.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
36.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	2	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
37.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH VASKULER DAN ENDOVASKULER	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
38.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS NEUROLOGI- NEUROVASKULAR, NEUROLINTERVENSI, IMAGING, OTOLOGI, OPTALMOLOGI	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
39.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-ONKOLOGI GINEKOLOGI (KONK)	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
40.	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	2	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
41.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1243	BBPK, BAPELKES/BAPELKESNAS UPTD BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
42.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	20	347	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
43.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	55955	LABORATORIUM KESEHATAN UPTD. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
44.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	9	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
45.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
46.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	3	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
47.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	4	55955	LABORATORIUM KESEHATAN UPTD. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
48.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
49.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
50.	AHLI PERTAMA - DOKTER	13	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
51.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
52.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	2	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
53.	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	2	347	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
54.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	2	347	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
55.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
56.	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	2	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
57.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	4	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
58.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
59.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	7	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
60.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	24	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
61.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	7	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
62.	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
63.	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	10	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
64.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
65.	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
66.	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
67.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	3	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
68.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	6	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
69.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
70.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	8	55955	LABORATORIUM KESEHATAN UPTD. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
71.	TERAMPIL - PERAWAT	11	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
72.	TERAMPIL - PERAWAT	8	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
73.	TERAMPIL - PERAWAT	5	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
74.	TERAMPIL - PERAWAT	1	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
75.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
76.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	8	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
77.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
78.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	10	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
79.	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS	1	28465	RS KHUSUS MATA BALI MANDARA
80.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	28450	RS JIWA PROVINSI BALI
81.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2	356	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
82.	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	20	347	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
83.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	29984	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
TOTAL		275		



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN XXV
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 545 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	D-IV MANAJEMEN PERHOTELAN;D-IV PARIWISATA;D-IV MANAJEMEN PARIWISATA;S-1 MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA;D-IV ADMINISTRASI PERHOTELAN;D-IV KEPARIWISATAAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU HUKUM	3	GUBERNUR BALI , DINAS PARIWISATA
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN;S-1 PSIKOLOGI;S-1 SOSIOLOGIS;S-1 GEOGRAFI;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 PLANOLOGI	3	GUBERNUR BALI , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	D-IV PENYULUHAN PERIKANAN;D-IV PERIKANAN TANGKAP;S-1 ILMU KELAUTAN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;D-IV ILMU KELAUTAN;S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN;S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	6	GUBERNUR BALI , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 ILMU TANAH;S-1 AGRONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV ILMU TANAH;S-1 AGROEKOTEKNOLOGI;S-1 KIMIA;D-IV PERKEBUNAN;D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 PERKEBUNAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;D-IV TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;D-IV TEKNIK PERTANIAN	3	GUBERNUR BALI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ILMU MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	6	GUBERNUR BALI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , BADAN PENGHUBUNG
9.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KESEHATAN
10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DPRD
11.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
12.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	11	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO UMUM DAN PROTOKOL
13.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO HUKUM DAN HAM
14.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
15.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
16.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KESEHATAN , RS JIWA PROVINSI BALI , DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
17.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN;S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KEBUDAYAAN
18.	AHLI PERTAMA - KONSELOR ADIKSI	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 ILMU KESEHATAN;S-1 ILMU KEDOKTERAN;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT;D-IV ILMU PSIKOLOGI;D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 ILMU PSIKOLOGI;S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	GUBERNUR BALI , DINAS KESEHATAN , RS JIWA PROVINSI BALI , DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
19.	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;D-IV MANAJEMEN PROYEK KONTRUKSI;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 ARSITEKTUR;S-1 PLANOLOGI;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV ARSITEKTUR;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL	3	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20.	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 ILMU KELAUTAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN;S-1 PERIKANAN;D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN/PERAIRAN;D-IV PERIKANAN;D-IV ILMU KELAUTAN	13	GUBERNUR BALI , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
21.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 ARSITEKTUR LANSKAP;D-IV ARSITEKTUR;D-IV TEKNIK ARSITEKTUR;D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG;S-1 ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 ARSITEKTUR LANSKAP;D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR;D-IV JASA KONSTRUKSI;D-IV MANAJEMEN PROYEK KONTRUKSI;D-IV TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI	6	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL;S-1 ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;D-IV TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN;S-1 TEKNIK MESIN;D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	2	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL	2	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
24.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;D-IV ARSITEKTUR;D-IV TEKNIK ARSITEKTUR;D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG;S-1 ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 ARSITEKTUR LANSKAP;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
25.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN BENCANA;S-1 SOSIOLOGI;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 PLANOLOGI;S-1 ARSITEKTUR;S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 ILMU HUKUM;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK GEOLOGI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 STATISTIK	8	GUBERNUR BALI , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
26.	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 GEOGRAFI;S-1 PENDIDIKAN EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 PENDIDIKAN EKONOMI MANAJEMEN;S-1 PLANOLOGI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
27.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA;D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN;D-IV EKONOMI MANAJEMEN;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 EKONOMI MANAJEMEN;D-IV ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 HUKUM PIDANA;S-1 HUKUM TATA NEGARA;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ADMINISTRASI NIAGA;S-1 ILMU TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 PSIKOLOGI	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
28.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	D-IV ARSITEKTUR;D-IV ARSITEKTUR;D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG;S-1 ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL;S-1 PLANOLOGI;S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
29.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 BIOLOGI;D-IV BIOLOGI;D-IV ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN;S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN;S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN	8	GUBERNUR BALI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , UPTD. BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
30.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 BIOLOGI;D-IV BIOLOGI;S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN;D-IV ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN;S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN	6	GUBERNUR BALI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
31.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SEMUA JURUSAN	4	GUBERNUR BALI , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
32.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	7	GUBERNUR BALI , DINAS PERHUBUNGAN
33.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK;D-IV ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S-1 TEKNIK MESIN;D-IV JURNALISTIK;S-1 JURNALISTIK	26	GUBERNUR BALI , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
34.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	40	GUBERNUR BALI , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
35.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	10	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO UMUM DAN PROTOKOL
36.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III PENYULUHAN KEHUTANAN;D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
37.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
38.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
39.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
40.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
41.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
42.	MAHIR - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KEBUDAYAAN
43.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
44.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
45.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	5	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO UMUM DAN PROTOKOL
46.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PERHUBUNGAN
47.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KESEHATAN
48.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
49.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
50.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
51.	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
52.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PARIWISATA
53.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
54.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
55.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , UPTD. PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
56.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DPRD
57.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
58.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
59.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
60.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
61.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , INSPEKTORAT
62.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
63.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO UMUM DAN PROTOKOL
64.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KEBUDAYAAN
65.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS KESEHATAN
66.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
67.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , DINAS PERHUBUNGAN
68.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
69.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
70.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	1	GUBERNUR BALI , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

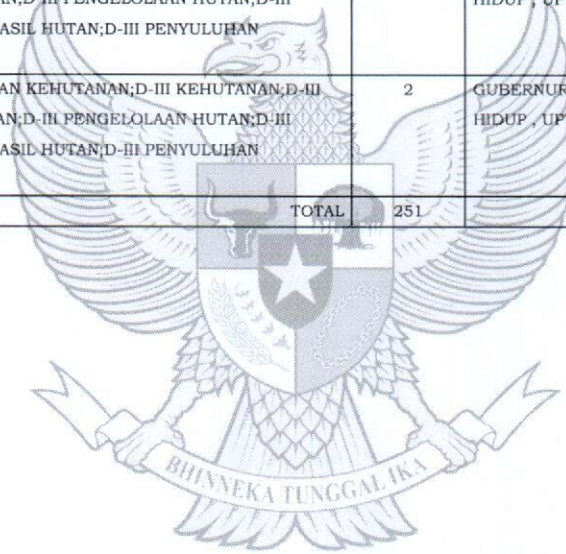


panro

MENTERIAN
DAYAGUNAAN APARATUR
REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
71.	TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III SOSIAL EKONOMI PERIKANAN;D-III TEKNOLOGI PANGAN;D-III TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN;D-III TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN;D-III SOSIAL EKONOMI PERIKANAN;D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN;D-III ILMU KELAUTAN;D-III ILMU PANGAN;D-III KETAHANAN PANGAN;D-III BIOLOGI	6	GUBERNUR BALI , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
72.	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III PENYULUHAN KEHUTANAN;D-III KEHUTANAN;D-III ILMU KEHUTANAN;D-III PENGELOLAAN HUTAN;D-III PENYULUHAN KEHUTANAN;D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN	8	GUBERNUR BALI , DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , UPTD. KPH BALI TIMUR
73.	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III PENYULUHAN KEHUTANAN;D-III KEHUTANAN;D-III ILMU KEHUTANAN;D-III PENGELOLAAN HUTAN;D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN;D-III PENYULUHAN KEHUTANAN	5	GUBERNUR BALI , DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , UPTD. KPH BALI SELATAN
74.	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III PENYULUHAN KEHUTANAN;D-III KEHUTANAN;D-III ILMU KEHUTANAN;D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN;D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN;D-III PENYULUHAN KEHUTANAN	4	GUBERNUR BALI , DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , UPTD. KPH BALI BARAT
75.	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN;D-III KEHUTANAN;D-III ILMU KEHUTANAN;D-III PENGELOLAAN HUTAN;D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN;D-III PENYULUHAN KEHUTANAN	8	GUBERNUR BALI , DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , UPTD. KPH BALI UTARA
76.	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III PENYULUHAN KEHUTANAN;D-III KEHUTANAN;D-III ILMU KEHUTANAN;D-III PENGELOLAAN HUTAN;D-III PENGOLAHAN HASIL HUTAN;D-III PENYULUHAN KEHUTANAN	2	GUBERNUR BALI , DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , UPTD. TAHURA NGURAH RAI
TOTAL			251	



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI